

## Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana: tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana = Fault and criminal liability, critical observation of separation theory of criminal act and criminal liability

Deskripsi Lengkap: <http://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20425630&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Kesalahan dan Penanggungjawaban Pidana masih menyisakan berbagai persoalan. Misalnya, dalam praktek hukum belum terdapat kesamaan pola penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Antara putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lain, kerap kali terdapat perbedaan dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hal ini dapat saja bersumber dari adanya kecenderungan melihat penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana semata-mata sebagai bagian dari tugas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kecenderungan demikian, juga terlihat dari minimnya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana mengenai hal itu. Undang-undang pidana umumnya hanya menentukan tentang perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana beserta ancaman pidana bagi pembuatnya. Pada sisi lain, hal ini membuka kemungkinan para akademisi memberi kontribusi teoretis mengenai hal ini.

<br><br>

Pada tahun 1955 Prof. Moejatno, SH mengemukakan pandangannya mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam literatur teori ini dikenal dengan ajaran dualistik, yang dalam disertasi ini disebut dengan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.

<br><br>

Teori ini menempatkan masalah pertanggungjawaban pidana terpisah dari masalah tindak pidana, sehingga dapat dipandang sebagai koreksi atas ajaran monistik yang memandang kesalahan semata-mata sebagai unsur subyektif tindak pidana. Selain itu, teori ini telah menjadi fundamen dasar penyusunan Rancangan KUHP, sehingga sangat bernilai strategis dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia. Namun demikian, hasil penelitian dalam disertasi ini menunjukkan teori ini umumnya tidak diterapkan, sekalipun harus diakui terdapat beberapa putusan pengadilan yang dapat dipandang sejalan dengan teori tersebut. Hal ini menyebabkan elaborasi lebih jauh tentang pola penentuan kesalahan dan penanggung-jawaban pidana berdasar pada teori dualistik, sangat diperlukan guna menunjang praktek peradilan ketika KUHP baru diberlakukan.

<br><br>

Berdasarkan teori ini kesalahan dikeluarkan dari rumusan tindak pidana. Hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam praktek. Misalnya, atas dasar apa penentuan kesalahan terdakwa, jika Penuntut Umum hanya berkewajiban membuktikan rumusan tindak pidana yang didalamnya tidak memuat unsur kesalahan. Apabila tidak mendapat pengaturan lebih lanjut, baik dalam hukum pidana materil (KUHP) maupun hukum pidana formil (KUHP), maka penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana cenderung ke arah fekt materiel. Hal ini terakhir ini merupakan pola penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang telah ditinggalkan sejak Water en Melk Arrest Hoge-Raad 1916. Dengan kata lain, hal ini akan membuat pertanggungjawaban pidana cenderung dilakukan secara strict liability, yang

oleh sementara kalangan dipandang sebagai pertanggungjawaban tanpa -kesalahan (liability without fault). Dalam disertasi ini dikemukakan konsepsi tentang 'penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana berdasar teori dualistik, tanpa terjebak pada kecenderungan menerapkannya sebagai *fait material* atau strict liability.

<br><br>

Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana yang menjadi fundamen penyusunan Rancangan' KUHP belum sepenuhnya terimplementasi dalam berbagai ketenluhanya. Se jauh mengenal perumusan tindak pidana hal ini hanya mempengaruhi dikeluarkannya kesengajaan dari rumusan tindak pidana. Sementara kealpaan tetap menjadi bagian rumusan tindak pidana. Hal ini pun akan menimbulkan persoalan dalam praktek. Tidak terbuktinya kealpaan yang menjadi bagian rumusan tindak pidana menyebabkan terdakwa dibebaskan. Sebaliknya, jika dipandang tidak terdapat kesengajaan ketika melakukan tindak pidana, maka terdakwa akan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Baik kesengajaan maupun kealpaan keduanya bentuk-bentuk kesalahan, sehingga kurang tepat jika tidak terdapatnya hal ini menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Disertasi ini mengemukakan konsepsi yang dengan itu perbedaan sebagaimana tersebut di atas dapat dihindari.

<hr>

<b>Abstract</b><br>

Fault and criminal liability still leaving some problems. For example, in practical law there is no similarity pattern of deciding the criminal fault and criminal liability yet. We often find that a verdict of a court is different with another court even they handled the same cases, it is usually often caused by the differences in determining the defendant fault and criminal liability. It could be caused by the inclination of some opinions said that the determination of the fault and criminal liability is part of the judges job in diagnose, judging and deciding a case. We can also say that the inclination caused by the minimum regulations of the crime legislations. In general the criminal legislations are only deciding the crime that is stated as a criminal act and the punishment for the doer. In the other hand it opens the possibility for the academician to contribute their theoretical knowledge for this case.

<br><br>

In 1955, Prof. Moejatno, SH made an opinion about criminal act and criminal liability. In a literature, this theory is known as the dualistic theory and it is called as the separation theory of criminal act and criminal liability in this dissertation. This theory placed the criminal liability problem (*mens rea*) separate from the criminal act problem (*actus reus*), so that we can see it as the correction of the monistic theory that says that fault is part of the physiological element of criminal act. Beside that, this theory has become the basic concept of the Bill of Criminal Code for it would become strategic value in the Indonesian law development. However; result of the research this dissertation shows that this theory isn't always used, even though there are some court decisions used it. It causes a further elaboration of the pattern of criminal act and criminal liability based on the dualistic theory that is very important to support the practical law when it is issued to the public.

<br><br>

Based on this theory, fault is not a part of criminal act. And it can cause problems in the law practice. For example, there will be a question about the basic determination of defendant's fault, if the General Prosecutor only has an obligation to prove a criminal act concept that isn't consist of fault. If there isn't any further regulation, neither in the substantive criminal law (Criminal Code) or procedure criminal law (Criminal

Code Procedure), then the determination between fault and criminal liability will be disposed to the *feit materiel* doctrine. And this is the pattern of the determination of fault and criminal liability that had been left since *Water en Melk Arrest Hoge Raad 1916*. In other words, it can be said that the pattern can make the criminal liability disposed done by strict liability. The last one by some authors as a pattern the determination of criminal liability without fault. This dissertation tells a conception of the determination of fault and criminal liability based on dualistic theory without trapped on the leaning on using it as *feit materiel* doctrine or strict liability.

<br><br>

The separation theory of criminal act and criminal liability that is used as the basic concept Bill of Criminal Code isn't fully implemented on some stipulations. As far as we know, this theory is only affected to the issued of the intention out a part of criminal act concept. In the mean time, faults still become a part of the criminal-act concept, and it is become a problem in the real practice. The unproven of intention that is a part of criminal act will release (*ontslaag van -alle rechtvervolgning*) the defendant. On the other hand, if a defendant seems to be had negligence in done the criminal act the law will let him free (*vrijspraak*). Both of intention and negligence are faults, so that it wouldn't be appropriate if the unexcitable of them make different consequences. This dissertation tells about a conception that will show us if we can avoid the differences mentioned.